

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen perencanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

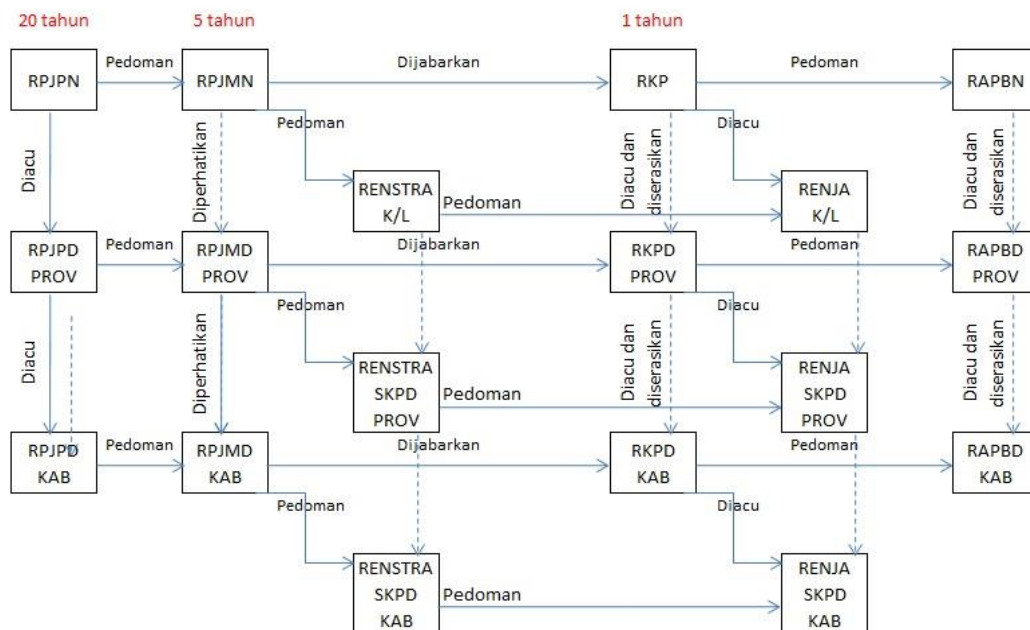
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang

tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bankesbangpol dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bankesbangpol;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bankesbangpol;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bankesbangpol;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan ,penanggulangan kemiskinan , ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 terhadap capaian renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s.d Tahun 2020

| BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | SATUAN | TARGET AKHIR RENSTRA (2023) | | Kondisi awal kinerja 2018 | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Realisasi sampai tahun 2020 | CAPAIAN sampai 2020 |
|--|--|----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | K | Rp | | Rp | Tar get | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | | |
| | | | | | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 |
| Program pendidikan politik masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Bantuan Partai Politik | Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik | Partai politik | 70 | 42.200.000,00 | 5.544.100,00 | 14 | 6.500.000,00 | 2.564.000,00 | 10 | 2.562.000,00 | 10 | 2.562.000,00 | 100 |
| Fasilitasi pembinaan dan monitoring ormas, Okp, LSM | Terbinanya dan termonitoringnya eksistensi dan perkembangan kehidupan organisasi bermasyarakat | Otrtang | 690 | 55.376.700,00 | 11.558.400,00 | 140 | 12.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Anggaran | | | | 97.576.700,00 | 17.102.500,00 | | 18.500.000,00 | 2.564.000,00 | | 2.562.000,00 | | 2.562.000,00 | 100 |
| Program peningkatan kewaspadaan nasional | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Verifikasi Proposal ijin Rizet/penelitian bagi mahasiswa/ lembaga | Terbentuknya TIM verifikasi proposal ijin riset/penelitian, survei Kab. Temanggung | Bulan | 60 | 34.300.000,00 | 6.262.300,00 | 12 | 6.270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembinaan dan Pengawasan Orang asing | Terpantaunya dokumen dan kegiatan orang asing di wilayah kabupaten Temanggung | Kecamatan | 100 | 37.000.000,00 | 7.785.600,00 | 20 | 8.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penanganan Masalah Aktual | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan yang sedang maupun yang diperkirakan akan terjadi baik idiologi, Politik dan Ekonomi | orang | 645 | 97.200.000,00 | 19.678.600,00 | 130 | 21.000.000,00 | 17.119.080,00 | 75 | 17.119.080,00 | 75 | 17.119.080,00 | 100 |
| Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya mediasi konflik sosial | Kegiatan | 37 | 77.900.000,00 | 4.250.076,00 | 8 | 16.000.000,00 | 2.440.000,00 | 3 | 2.440.000,00 | 3 | 2.440.000,00 | 100 |
| Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | bulan | 40 | 1.550.000.000,00 | 0 | 10 | 500.000.000,00 | 1.930.600.600,00 | 10 | 1.929.754.600,00 | 3 | 1.929.754.600,00 | 100 |
| Kewaspadaan Dini Daerah | terlaksananya kegiatan kewaspadaan dini daerah | bulan | 60 | 448.000.000,00 | 0 | 12 | 127.800.000,00 | 42.430.100,00 | 10 | 42.300.550,00 | 10 | 42.300.550,00 | 100 |
| Total Anggaran | | | | 2.244.400.000 | 37.976.576 | | 679.670.000 | 1.992.589.780 | | 1.991.614.230 | | 1.991.614.230 | 67 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|------------|
| Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoring dan evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi | Kegiatan | 150 | 66.700.000,00 | 10.079.100,00 | 30 | 11.000.000,00 | 4.711.200,00 | 24 | 4.710.300,00 | 10 | 4.710.300,00 | 100 |
| Pencegahan dan Pengawasan Perkembangan Aliran Sesat Keagamaan | Meningkatnya hubungan yang harmonis inter dan antar umat bergama khususnya terhadap penganut Ahmadiyah | Orang | 1150 | 180.700.000,00 | 36.064.800,00 | 225 | 37.000.000,00 | 378.000,00 | 0 | 378.000,00 | 0 | 378.000,00 | 100 |
| Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM) | Terfasilitasi dan terbinaanya kerukunan hidup antar umat beragama dan penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM) | Orang | 645 | 119.200.000,00 | 19.499.000,00 | 130 | 21.000.000,00 | 197.000,00 | 0 | 197.000,00 | 0 | 197.000,00 | 100 |
| Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila | Tertanamnya nilai nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara | Orang | 4800 | 339.500.000,00 | 47.163.000,00 | 950 | 51.000.000,00 | 2.090.000,00 | 0 | 2.090.000,00 | 0 | 2.090.000,00 | 100 |
| Total Anggaran | | | | 706.100.000,00 | 112.805.900,00 | | 120.000.000,00 | 7.376.200,00 | | 7.375.300,00 | | 7.375.300,00 | 100 |
| Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia | Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif | Desa | 33 | 448.500.000,00 | 38.735.000,00 | 5 | 119.000.000,00 | 54.728.900,00 | 2 | 58.701.700,00 | 2 | 58.701.700,00 | 99 |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan | Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara | orang | 3300 | 405.700.000,00 | 64.625.100,00 | 650 | 76.000.000,00 | 4.390.000,00 | 3 | 4.090.000,00 | 3 | 4.090.000,00 | 93 |
| Total Anggaran | | | | 854.200.000,00 | 103.360.100,00 | | 195.000.000,00 | 59.118.900,00 | | 62.791.700,00 | | 62.791.700,00 | 96 |
| Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|----------------------|---------------------|-----|---------------------|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|-----------|
| Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | Tersosialisasinya Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 | Tersosialisasinya Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 kepada 900 orang masyarakat Kabupaten Temanggung | 1900 | 107.700.000,00 | 15.358.100,00 | 900 | 0 | 267.619.200,00 | 8 | 249.098.500,00 | 8 | 249.098.500,00 | 93 |
| Total Anggaran | | | | 107.700.000,00 | 15.358.100,00 | | 0,00 | 267.619.200,00 | | 249.098.500,00 | | 249.098.500,00 | 93 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah. | % | | | | | | | | | | | |
| | Renja,RKA,DPA,Lakip, RPJMD, Renstra,dll | Bulan | 60 | 28.000.000,00 | 4.619.500,00 | 33 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 7 | 2.480.000,00 | 10 | 2.480.000,00 | 99 |
| Total Anggaran | | | | 28.000.000,00 | 4.619.500,00 | | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.480.000,00 | | 2.480.000,00 | 99 |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya langganan air, listrik, telp dan fax / internet | Bulan | 60 | 139.422.500,00 | 13.356.580,00 | 12 | 34.900.000,00 | 12.799.980,00 | 12 | 11.621.024,00 | 12 | 11.621.024,00 | 91 |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih | Bulan | 60 | 15.602.500,00 | 3.981.100,00 | 12 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 12 | 3.992.400,00 | 12 | 3.992.400,00 | 100 |
| Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Bulan | 60 | 40.166.500,00 | 9.989.500,00 | 12 | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 12 | 5.876.500,00 | 12 | 5.876.500,00 | 98 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya spanduk / banner peringatan, himbauan, motivasi, ucapan selamat pada hari- hari besar dan tersedianya cetak | Bulan | 60 | 28.884.500,00 | 6.980.200,00 | 12 | 6.998.000,00 | 5.998.000,00 | 12 | 5.958.000,00 | 12 | 5.958.000,00 | 99 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya lampu,kabel, fitting, stopkontak dan alat listrik lainnya | Bulan | 60 | 8.033.300,00 | 1.975.000,00 | 12 | 1.993.000,00 | 1.493.000,00 | 12 | 1.485.000,00 | 12 | 1.485.000,00 | 99 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar nasional dan daerah/provinsi | Eksplar | 120 | 10.425.600,00 | 2.460.000,00 | 12 | 2.580.000,00 | 2.520.000,00 | 12 | 2.460.000,00 | 12 | 2.460.000,00 | 98 |
| Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya jamuan makan dan minum untuk pegawai, tamu dan peserta rapat | Bulan | 60 | 40.166.500,00 | 9.948.000,00 | 12 | 10.000.000,00 | 6.139.000,00 | 12 | 6.037.000,00 | 12 | 6.037.000,00 | 98 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|------------|
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersampainya dan diterimanya informasi dlm rangka menunjang Tupoksi | Bulan | 60 | 200.832.500,00 | 48.704.954,00 | 12 | 45.000.000,00 | 4.612.000,00 | 12 | 19.346.163,00 | 12 | 19.346.163,00 | 99 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Tersampainya dan diterimanya informasi dlm rangka menunjang Tupoksi | Bulan | 60 | 40.166.500,00 | 9.530.240,00 | 12 | 10.000.000,00 | 7.045.000,00 | 12 | 6.755.101,00 | 12 | 6.755.101,00 | 96 |
| Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | Terselesainya dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran / kegiatan dengan baik dan tepat waktu | Bulan | 60 | 29.492.200,00 | 3.259.125,00 | 12 | 5.800.000,00 | 3.800.000,00 | 12 | 5.868.500,00 | 12 | 5.868.500,00 | 93 |
| Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor | tersedianya satpam penjaga kantor | orang | 24 | 336.000.000,00 | 0 | 12 | 126.000.000,00 | 106.733.225,00 | 12 | 80.448.161,00 | 12 | 80.448.161,00 | 75 |
| Total Anggaran | | | | 889.192.600,00 | 110.184.699,00 | | 257.271.000,00 | 161.140.205,00 | | 149.847.849,00 | | 149.847.849,00 | 95 |
| Program peningkatan sarana prasarana aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya sarana sarana laptop, proyektor dan alat komunikasi HT | buah | 20 | 80.333.000,00 | 19.656.600,00 | 7 | 19.965.000,00 | 1.850.000,00 | 5 | 19.735.000,00 | 5 | 19.735.000,00 | 100 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan Dinas roda 4, 3 buah dan roda 2, 5 buah | Bulan | 60 | 140.350.700,00 | 31.750.579,00 | 12 | 34.998.000,00 | 29.996.500,00 | 12 | 23.271.871,00 | 12 | 23.271.871,00 | 78 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya Printer, Laptop ,PC, Monitor dan Proyektor | buah | 25 | 19.851.200,00 | 4.910.500,00 | 12 | 5.000.000,00 | 4.999.100,00 | 12 | 2.716.000,00 | 12 | 2.716.000,00 | 54 |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor,Aula, Rumah Dinas dan Ruang arsip | buah | 20 | 40.166.500,00 | 9.901.000,00 | 12 | 9.997.000,00 | 7.996.900,00 | 2 | 7.964.000,00 | 12 | 7.964.000,00 | 100 |
| Total Anggaran | | | | 280.701.400,00 | 66.218.679,00 | | 69.960.000,00 | 44.842.500,00 | | 53.686.871,00 | | 53.686.871,00 | 83 |
| Program peningkatan disiplin aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | | 7.500.000,00 | 0 | 15 | 3.750.000,00 | 3.670.500,00 | 15 | 3.564.000,00 | 15 | 3.564.000,00 | 100 |
| Total Anggaran | | | | 7.500.000,00 | 0,00 | | 3.750.000,00 | 3.670.500,00 | | 3.564.000,00 | | 3.564.000,00 | 100 |
| Total Semua Anggaran | | | | 5.207.870.700 | 467.626.054 | | 1.345.401.000 | 2.537.750.785 | | 2.519.456.450 | | 2.519.456.450 | 93 |

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

a. Capaian Kinerja Sasaran Bankesbangpol

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi BANKESBANGPOL Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran dan 10 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Tabel 3.1.
Predikat Kinerja Sasaran

| No | Predikat | Jumlah Sasaran | Jumlah Indikator |
|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 1 | Memuaskan | 1 | 5 |
| 2 | Sangat baik | 3 | 5 |
| 3 | Baik | 1 | - |
| 4 | Cukup | - | - |
| 5 | Kurang | - | - |
| Jumlah | | 5 | 10 |

Dari tabel predikat kinerja sasaran disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori **“Memuaskan”**. Secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Pencapaian Sasaran Bankesbangpol

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata capaian | Keterangan |
|---------------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya Pendidik dan Politik Masyarakat | 3 | 93 | Sangat baik |
| 2 | Meningkatnya Kewaspadaan Nasional | 1 | 100 | Memuaskan |
| 3 | Meningkatnya Ketahanan seni, Budaya Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi | 2 | 100 | Memuaskan |
| 4 | Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan | 2 | 93 | Sangat Baik |
| 5 | Meningkatnya pembinaan & Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 2 | 84 | Sangat Baik |
| Jumlah | | 10 | 94 | Sangat Baik |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran dan 10 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator .

Kinerja Utama Bankesbangpol Kabupaten Temanggung tahun 2020 dapat tercapai **94%** atau kategori **“Sangat Baik”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Bankesbangpol Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** yaitu berada pada rentang Capaian 94% berada pada angka 94. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2020 ini merupakan capaian kinerja tahun kedua Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 capaian kinerja sasaran juga telah mencapai 90%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

| No | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | Capaian s/d 2020 (%) | Status |
|----|--|--------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|----------------------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | Indek Toleransi | % | 3,15 | 0,64 | 4,15 | 4,17 | 4,19 | 0,8 | 4 | | | | 100 | TT |
| 2 | Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan | % | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | | | | 0 | UK |
| 3 | Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30,7 | 0 | | | | 0 | UK |
| 4 | Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87,20 | 87,21 | | | | 87,21 | AT |
| 5 | Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | | | | 83,33 | AT |
| 6 | Persentase keterwakilan perempuan di DPRD | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31,11 | 33,33 | | | | 100 | TT |
| 7 | Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | 0 | UK |
| 8 | Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | TT |
| 9 | Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | TT |
| 10 | Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | % | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 68,60 | | | | 55,04 | AT |
| 11 | Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | % | 30,3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 75 | 0 | | | | 0 | UK |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Bankesbangpol Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Bankesbangpol Tahun 2019-2020

| Tujuan (IKU) | 2019 | | | 2020 | | | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%) |
|--|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|
| | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | |
| Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat | 100 | 85,54 | 85,54 | 100 | 98,32 | 98,32 | 100 |

Capaian indikator tujuan Bankesbangpol tahun 2020 sebesar 98,32% dari target 100%, dari 5 program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2020 sebanyak 5 program.

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat, dan rekomendasi dan tindak lanjut keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Presentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan capaian 87,21 berstatus AT
 - Faktor Penghambat
Faktor Penghambat indikator tersebut adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pesta demokrasi.
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Memberikan Banyak Pemahaman dengan sosialisasi akan pentingnya demokrasi melalui Pemilu.
- Indikator Kinerja Presentase keterwakilan perempuan di lembaga politik dengan capaian 83,33 berstatus AT
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Budaya patriarki yang menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah.
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Memberikan Banyak Pemahaman dengan cara sosialisasi terhadap Perempuan bahwa kedudukan berpolitik itu setara sesuai dengan kemampuan kaum laki laki.
- Indikator Kinerja Presentase keterwakilan perempuan di DPRD dengan capaian 100 berstatus TT
Faktor pendorong indikator tersebut adalah karna dengan adanya UU No.

- 2 Tahun 2008 pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan maksimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat
4. Indikator Kinerja Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah dengan capaian 100 berstatus TT
Faktor Pendorong adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.
 5. Indikator Kinerja Presentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dengan capaian 0 berstatus UK
Faktor Penghambat indikator tersebut adalah karna belum terbentuknya regulasi yang mencakup FKUB di Kecamatan .
Rekomendasi dan Tindak Lanjut sedang berupaya keras untuk membetuk Regulasi yang berkaitan dengan FKUB di Kecamatan.
 6. Indikator Kinerja Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni budaya, agama kemasyarakatan dan ekonomi dengan capaian 100 berstatus TT
Faktor Pendorong adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.
 7. Indikator Kinerja Presentase sekolah yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan capaian 0 berstatus UK
Faktor Pendorong adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.
 8. Indikator Kinerja Presentase Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan capaian 0 berstatus UK
Faktor penghambat indikator tersebut karna masalah wawasan kebangsaan bagi masyarakat dianggap tidak penting sehingga dalam penyampaian yang dilaksanakan kurang dipahami.
Rekomendasi dan Tindak lanjut menambah intensitas sosialisasi pentingnya pemahaman tentang Kebangsaan dan bernegara bagi masyarakat.
 9. Indikator Kinerja Presentase Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan capaian 55,04 berstatus AT
Faktor penghambat indikator tersebut adalah alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut dengan cara sosialisasi pentingnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba bagi Kehidupan.
 10. Indikator Kinerja Presentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan capaian 0 berstatus UK.
Faktor Penghambat indikator tersebut adalah rendahnya pendidikan moral dan keagamaan masyarakat.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Memberikan Banyak Pemahaman dengan cara sosialisasi pentingnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba bagi Kehidupan.

2.2.2. Data Pokok

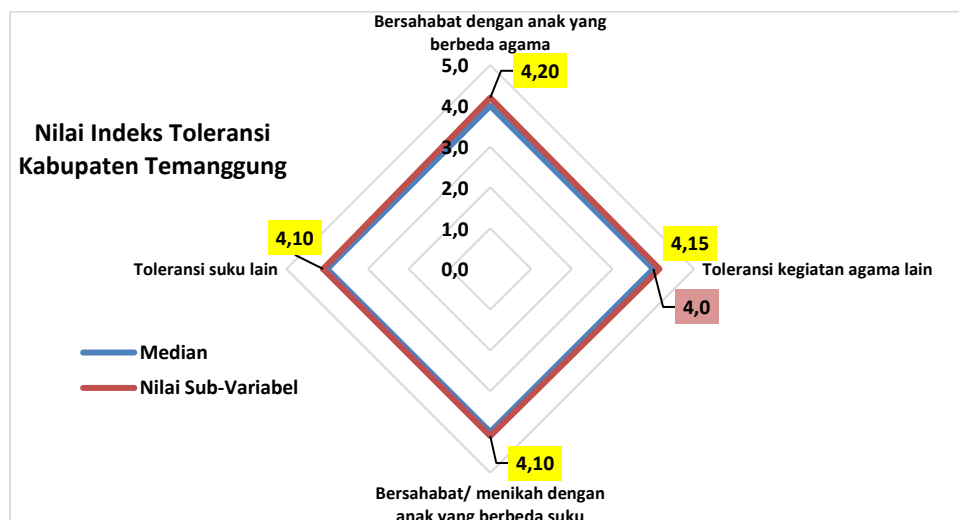
Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pendidikan dan Data Pokok Bidang Keamanan ,dengan rincian sebagai berikut:

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. INDEKS TOLERANSI

Indeks toleransi merupakan salah satu variable dalam indeks pembangunan masyarakat , sebagai variable yang menyatakan rasa saling menghargai dan menghormati Toleransi antar suku Toleransi antar agama Seluruh komponen sub variable memiliki nilai rata-rata yang sama Bentuk toleransi warga dalam hal kegiatan keagamaan dan perbedaan terhadap budaya di lingkungan sekitar yang baik Untuk menilai indikator toleransi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari dua hal yaitu agama serta suku/ etnik.

Berdasarkan Variabel tersebut diturunkan menjadi 4 Variabel yaitu Bersahabat dengan anak yang berbeda agama, toleransi kegiatan agama lain, bersahabat/ menikah dengan anak yang berbeda suku, dan kegiatan suku lain.untuk mendapatkan nilai tersebut dilakukan survey pada masyarakat dimana diwakili oleh anggota BPD/LPMK yang telah dipilih, dalam melaksanakan analis perhitungan dilakukan dengan skala nilai penimbang 0,5 dimana berasal dari hasil pembagian dengan jumlah sub variable pada setiap variabel penyusun.



Nilai Interval IKPD

- <1.8 = Tidak Baik
- 1.8-<2.6 = Cukup
- 2.6-<3.5 = Baik
- 3.5-<4.2 = Sangat Baik

➤ 4.2-5= Memuaskan

Berdasarkan penghitungan statistik modal sosial tahun 20214 bahwa nilai indeks toleransi di Indonesia yaitu 0.49/49 % dalam kategori (sedang) dan hasil dari nilai indeks toleransi di kabupaten Temanggung 4.14 (82.8%) kategori sangat baik.

2. PRESENTASE PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Yang dimaksud Prosentase Jumlah Pemilih yang menggunakan hak Pilihnya adalah Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu legislatif.

Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan rumus Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan dikalikan 100. Maka Prosentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legis latif untuk masa bakti Tahun 2015- 2020 TW IV dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;

TABEL I
PRESENTASE PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DALAM
PILEG 2019 s.d 2020 Triwulan IV

| NO. | URAIAN | TAHUN | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS | 485.608 | 485.608 | 485.608 | 485.608 | 529.859 | 529.859 |
| 2. | Jumlah Pemilih tetap secara Keseluruhan | 582.486 | 582.486 | 582.486 | 582.486 | 607.598 | 607.598 |
| 3. | Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan dikalikan 100 | 83,36 % | 83,36 % | 83,36 % | 83,36 % | 87.20 % | 87.20 % |

Sumber : KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Temanggung Th 2020.

3. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA POLITIK

Keterwakilan perempuan di Lembaga politik adalah Jumlah perempuan yang mewakili di lembaga Politik.

Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia paska reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.

Karna untuk memperoleh angka prosentase Jumlah keterlibatan perempuan yang menjadi pengurus tingkat kabupaten di 10 partai politik

Untuk mengetahui prosentasenya dapat digunakan rumus sebagai berikut Jumlah pengurus partai politik perempuan dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100, Maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL II
Presentase Perempuan Yang Menjadi Pengurus
Di 10 Partai Politik Yang Memiliki Kursi Keterwakilan di DPRD
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| NO. | URAIAN | TAHUN | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah pengurus partai politik perempuan | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 |
| 2. | Jumlah seluruh pengurus partai politik | 88 | 388 | 388 | 388 | 392 | 392 |
| 3. | Persentase keterwakilan perempuan dilembaga politik (%) | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 25,00 | 25,00 |

Sumber: Kantor Kesbangpol Temanggung 2020

Kaum perempuan bisa memperoleh hak politiknya dan mencapai tujuannya dalam masalah kesetaraan Gender dan keadilan dalam organisasi politik jika punya kemampuan berkonsolidasi dan komunikasi politik dan secara Undang undang diberikan posisi untuk itu.

Jumlah Perempuan menjadi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang mempunyai wakil di DPRD Hasil Pemilu 2019, Data ini berdasarkan Surat Keputusan terkait Susunan Pengurus masing masing Partai Politik .

| No | Nama Partai | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Partai Gerindra | 14 | 7 | 21 |
| 2 | Partai Golkar | 45 | 16 | 61 |
| 3 | PPP | 55 | 10 | 65 |
| 4 | PKS | 5 | 3 | 8 |
| 5 | PKB | 31 | 18 | 49 |
| 6 | Partai Hanura | 54 | 11 | 65 |
| 7 | Partai Nasdem | 17 | 5 | 22 |
| 8 | PDIP | 13 | 6 | 19 |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 48 | 16 | 64 |
| 10 | Demokrat | 12 | 6 | 18 |
| | TOTAL | 294 | 98 | 392 |

5 .PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KAB.TEMANGGUNG

Yang dimaksud Keterwakilan Perempuan di DPRD adalah Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung Hasil Pemilu 2019 . Untuk masa bakti Periode 2019-2024.

Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD maka dapat digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota DPRD dikalikan 100 . Maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL III
PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD
2015-2020 s.d Triwulan IV

| NO. | URAIAN | TAHUN | | | | | |
|-----|---|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 2. | Jumlah kursi Total keanggotaan di DPRD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3. | Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD Partai Politik | 31,11 % | 31,11% | 31,11% | 31,11 % | 31,11 % | 33,33 % |

Sumber: Badan Kesbangpol dan KPUD Temanggung th 2020

Bahwa Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD tahun 2014-2019 sebanyak 14 orang atau 31,11 % sedang Tahun 2019-2024 sebanyak 15 orang dari total kursi anggota DPRD sebanyak 45 orang hal ini sudah diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu terkait 30 % unsur keterwakilan perempuan .

Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik adalah Keterwakilan perempuan yang menjadi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten :

| No | Nama | Partai |
|----|-------------------------------|----------|
| 1 | IKA RIZKIWATI,SE | PDIP |
| 2 | DWI LINDA WATI, SH, MH | GOLKAR |
| 3 | UMI FADHILAH | NASDEM |
| 4 | SITI MARGO LESTARI | HANURA |
| 5 | HERNANDIA HAPPY SAFITRI | PDIP |
| 6 | PERMATRIYDANI W, S.HI | PKS |
| 7 | TRI EKO WASTI | PKB |
| 8 | E. INTAN KURNIASARI,SE, M.Acc | PDIP |
| 9 | INDAH CAHYANI,S.Sos | GERINDRA |
| 10 | YENI KUSNITA | GERINDRA |
| 11 | ELYNAWATI .S.Pd | PKS |

| | | |
|----|-----------------------------|--------|
| 12 | Dra.TITIK WINARTI | PDIP |
| 13 | Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag | NASDEM |
| 14 | Hj.UMI TSUWAIBAH ,S.Ag.M.Si | PKB |
| 15 | DWI SULISTYOWATI | PDIP |

6. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH

Yang dimaksud dengan terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah yakni, konflik yang muncul/ terdekteksi yang berhubungan dengan bidang politik dan konflik yang berpotensi dapat mengganggu keamanan daerah di wilayah Kabupaten Temanggung.(Sumber dari Bidang Politik dan kewaspadaan nasional) Untuk mencari prosentase konflik politik dan keamanan daerah yang telah tertangani dapat menggunakan rumus berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan dikali 100 %

Adapun prosentase konflik yang telah tertangani dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel IV
Persentase Terdeteksi dan Tertanganinya Konflik Politik dan Keamanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah konflik poltik dan keamanan daerah yang tertangani | 20 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| | Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang dilaporkan | 20 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Persentase jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber :Kesbangpol Kab.Temanggung, 2020

Tebel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 setiap konflik politik dan keamanan yang muncul, dapat tertangani 100% oleh Bankesbangpol.

7. CAKUPAN TERBENTUKNYA FKUB DI KECAMATAN

FKUB adalah Forum yang mencakup tentang kerukunan Umat beragama dikabupaten temanggung.

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan maka dapat digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada di kali 100%

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V
Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
Tahun 2015 - 2020 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah FKUB di kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah kecamatan di kab. Temanggung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber :KesbangpolKab. Temanggung, 2020

Pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan sampai dengan tahun 2020 belum dapat terbentuk, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang menjadi rujukan untuk membentuk FKUB di tingkatKecamatan. Sehingga prosentase terbentuknya FKUB di tingkat Kecamatan 0%.

8. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI

Prosentase terdeteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi merupakan indikator untuk mendeteksi dan menangani konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Untuk memperoleh prosentase terdeteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dapat digunakan rumus berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan di kali 100 %

Prosentasi terdeteksinya dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi di Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel VI
Prosentase Terdeteksi dan Tertangani Konflik Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Tahun 2015 - 2020 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah konflik yang tertangani | 21 | 26 | 31 | 40 | 5 | 2 |
| 2 | Jumlah keseluruhan konflik yang dilaporkan | 21 | 26 | 31 | 40 | 5 | 2 |
| 3 | Prosentase konflik yang tertangani | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber :KesbangpolKab. Temanggung, 2020

Dari tahun 2015 sampai dengan 2020 setiap konflik seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang muncul dapat tertangani dan terselesaikan 100% oleh Bankesbangpol.

9. PERSENTASE SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN KEBANGSAAN

Sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan adalah sebuah kegiatan dalam rangka memberikan sebuah pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan di sekolah di Kabupaten Temanggung. Untuk sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan adalah SMP/MTS, SMA/SMK, DAN UNIVERSITAS.

Adapun untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, maka dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi jumlah sekolah yang ada dikali 100.

Tabel VII
Prosentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Tahun 2015-2020 s.d triwulan IV

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | 30 | 30 | 40 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah keseluruhan sekolah yang ada | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 3 | Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | 17,8 | 17,8 | 23,8 | 26,7 | 0 | 0 |

Di tahun 2020 tidak ada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan karna anggaran yang difocusing.

10. PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN

Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan Adalah sebuah kegiatan dalam rangka memberikan sebuah pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung. (sumber bidang bina idiologi dan wasbang)

Adapun untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, maka dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di bagi jumlah Desa yang ada dikali 100.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table berikut ini:

TABEL IX
Prosentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan
Kebangsaan Tahun 2015-2020 s.d triwulan IV

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|-------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | 15 | 18 | 21 | 23 | 89 | 0 |
| 2 | Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 3 | Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | 1,73 | 1,03 | 1,03 | 0,69 | 66,92 | 0 |

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2020

Tahun 2020 melaksanakan 0 kegiatan dari total 266 Desa di Kab. Temanggung.

11. PERSESENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pelaksanaan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yakni dengan sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba dari unsur terkait yang dilaksanakan di desa/ kelurahan di Kabupaten Temanggung. Untuk mendapatkan persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan rumus: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di bagi Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100. Persentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel X
Prosentase Desa/Kel yangtelahmendapatkanPembinaanPencegahan,
Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|--------|
| 1 | Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 4 | 6 | 9 | 10 | 0 | 183 |
| 2 | Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 3 | Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 0 | 0,69 | 1,03 | 0,34 | 0 | 68,8 % |

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2020

Desa / Kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan, penyalahgunaan narkoba tahun 2020 ada di 183 desa dari 12 Kecamatan

atau 68,8 %, masing masing desa diambil dari perwakilan tokoh masyarakat atau tokoh pemuda .

12. CAKUPAN SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Merupakan kegiatan pembinaan pencegahan penyalagunaan narkoba di tingkat SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung. Adapun untuk menghitung jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka dapat dihitung dengan rumus berikut: Jumlah Sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah seluruh Sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100. Maka jumlah Sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada table dibawah ini :

Tabel XI
Prosentase jumlah SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 1 | Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 41 | 61 | 81 | 101 | 63 | 0 |
| 2 | Jumlah sekolah yang ada | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 3 | Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 75 | 0 |

Sumber :KesbangpolKab. Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba Tahun 2020 sebanyak 0.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja Bankesbangpol dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bankesbangpol sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Bankesbangpol dari 10 indikator, terdapat 7, indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - a. Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan

- b. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
 - c. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
 - d. Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - e. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - f. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
 - g. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bankesbangpol, antara lain :
- a. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan banyak terpotong karena adanya refocusing anggaran
 - b. Pandemi covid 19 mengakibatkan kegiatan di Bankesbangpol yang rata-rata adalah kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bankesbangpol Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Mencukupi kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Mencukupi sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal ini tersebut berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan;
3. Mengoptimalkan pola koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun dengan instansi vertikal;
4. Mengoptimalkan partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat usulan penambahan anggaran pada kegiatan yang sudah ada dalam rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Komponen Instalasi Listrik
 - c. Upah tenaga keamanan dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

- d. Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat, dan penambahan biaya STNK kendaraan.
- e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- f. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
- g. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- h. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut :

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana |
|----|--|------------|---|-------------------|--------|----------------|----|--|---|-------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.523.516.000 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 6.655.511.390 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 1.640.328.000 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1.640.328.222 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Temanggung | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 | Bulan | 1.250.000 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 | Bulan | 1.250.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Temanggung | Tersedianya bahan logistik kantor | 12 | Bulan | 5.000.000 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | 12 | Bulan | 5.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Temanggung | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 | Bulan | 4.000.000 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 | Bulan | 4.000.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Temanggung | Terfasilitasinya kunjungan tamu | 12 | Bulan | 6.500.000 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya kunjungan tamu | 12 | Bulan | 6.500.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Temanggung | Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 | Bulan | 15.000.000 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 | Bulan | 15.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Temanggung | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 | Bulan | - | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 | Bulan | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Temanggung | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | Bulan | 24.750.000 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | Bulan | 24.750.000 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Temanggung | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 | Bulan | 2.500.000 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 | Bulan | 2.500.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Temanggung | Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor | 12 | Bulan | 126.000.000 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor | 12 | Bulan | 126.000.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - |

| | | | | | |
|---|------------|--|----|----------|------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Temanggung | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 12 | Bulan | 30.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Temanggung | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya | 12 | Bulan | 3.250.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Temanggung | Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 12 | Bulan | 3.000.000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Temanggung | Tersedianya kendaraan dinas operasional | 2 | unit | |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Temanggung | Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai | 1 | paket | |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Temanggung | Tersedianya peralatan kantor yang memadai | 1 | paket | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Temanggung | Tersedianya pakaian dinas pegawai | 1 | paket | |
| | | | | | |
| PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | |
| <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Temanggung | Terlaksananya penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3 | kegiatan | 68.000.000 |
| | | | | | |
| PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|----|----------|------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 12 | Bulan | 55.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya | 12 | Bulan | 3.250.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 12 | Bulan | 3.000.000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | | Tersedianya kendaraan dinas operasional | 2 | unit | |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai | 1 | paket | |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Tersedianya peralatan kantor yang memadai | 1 | paket | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | | Tersedianya pakaian dinas pegawai | 1 | paket | |
| | | | | | - |
| PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | |
| <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Terlaksananya penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3 | kegiatan | 68.000.000 |
| | | | | | - |
| PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---|--|--|---------------|
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah | Temanggung | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah | | | 1.161.687.850 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | |
| Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Temanggung | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 19.200.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Temanggung | | | | 144.000.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------|
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah | | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah | | | 1.411.687.750 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | |
| Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 19.200.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | 2.514.045.640 |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | |

| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|---|--|--|--|--|-------------|
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | |
| | | | | | 249.050.150 | | | | | | 736.000.000 |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | |
| | | | | | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 |

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Poalitik Kabupaten Temanggung Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

c. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5.1

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume/ Besaran | Catatan |
|----|--|-----------------------------------|--|--------------------|---------|
| 1. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan KQualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Desa Pakurejo dan Desa Malangsari | Terlaksananya Penyuluhan tentang hukum dan Perlindungan Masyarakat | 1 Paket | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:
 1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan, sasaran, indicator sasaran terget kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan viai misi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2022

| VISI Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------|-------------------|---------------------------|
| VISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR SASARAN | SATUAN TARGET | TARGET TAHUN 2020 | TARGET KONDISI AKHIR 2020 |
| Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu | % | 100 | 100 |
| Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah | Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah | Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah | Besaran ketersediaan data statistik | % | 100 | 42 |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan | Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; | Persentase Anggaran Penata usahaan kantor Kesbangpol terhadap Total Belanja Langsung Kantor Kesbangpol dalam 1 (satu) Tahun | % | 100 | 26 |

Sumber : Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2022

| RANCANGAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2022 | | | RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 | | | (+ / -) |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | Pagu Indikatif |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3,523,516,000 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6,655,511,390 | 3.131.995.390 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA | 1,861,578,000 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA | 1,886,578,000 | 25.000.000 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 1,640,328,000 | | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 1,640,328,000 | - |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,640,328,000 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,640,328,000 | - |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 31,750,000 | | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 31.750.000 | - |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,250,000 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,250,000 | - |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5.000.000 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5.000.000 | - |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4.000.000 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4.000.000 | - |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.500.000 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.500.000 | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15.000.000 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15.000.000 | - |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 153,250,000 | | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 153,250,000 | - |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.750.000 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.750.000 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---|---|----------------------|--------------------|
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.500.000 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.500.000 | - |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 126,000,000 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 126,000,000 | - |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 36.250.000 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 61,250,000 | 25.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30,000,000 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 55,000,000 | 25.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.250.000 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.250.000 | - |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.000.000 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.000.000 | - |
| 2 | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 68,000,000 | | 2 | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 68,000,000 | - |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 68,000,000 | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 68,000,000 | - |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 68,000,000 | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 68,000,000 | - |
| 3 | PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1.161.687.850 | | 3 | PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1,411,687,750 | 249.999.900 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|
| | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i> | 1.161.687.850 | | | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i> | 1,411,687,750 | 249.999.900 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah | 1.161.687.850 | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah | 1,411,687,750 | 249.999.900 |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 19,200,000 | | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 19,200,000 | - |
| | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i> | 19,200,000 | | | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i> | 19,200,000 | - |
| | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 19,200,000 | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 19,200,000 | - |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 144,000,000 | | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 2.514.045.640 | 2.370.045.640 |
| | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i> | 144,000,000 | | | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i> | 2.514.045.640 | 2.370.045.640 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|---|--|--------------------|---------------|
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 144,000,000 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 2.514.045.640 | 2.370.045.640 |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 269.050.150 | | 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 756,000,000 | 486.949.850 |
| | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i> | 269.050.150 | | | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i> | 756,000,000 | 486.949.850 |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 249,050,150 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 736.000.000 | 466.949.850 |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 20.000.000 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 20.000.000 | - |

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa pagu anggaran awal Renja (Ranwal) sebesar Rp. 3.523.516.000,00 naik menjadi Rp 6.655.511.390 yang merupakan anggaran penetapan. Ada kenaikan senilai 3.131.995.390. Kenaikan ini terdapat pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik,

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator program/kegi atan | Rencana Kerja Tahun 2022 RENJA 2022 BADAN KESBANG | | | | Alokasi Anggaran 2021 | Rencana Kerja Tahun 2020 | | | Perkiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|-----|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Satua n | Pagu Indikatif | | Alokasi | Realisasi | % | | | | | | |
| 8 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | URUSAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai | Kesbangpol | 12 | Bulan | 1,640,328,000 | 1.640.328.222 | 1.491.721.474 | 1.226.987.935 | 82 | 2.656.564.230 | DAU |
| 8 | 1 | 1 | 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor | Kesbangpol | 12 | Bulan | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.493.000 | 910.500 | 61 | 3.520.000 | DAU |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Kesbangpol | 12 | Bulan | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 3.588.500 | 60 | 5.500.000 | DAU |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Peggandaan | Kesbangpol | 12 | Bulan | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.998.000 | 58.700.300 | 95 | 4.400.000 | DAU |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Tersedianya Makan dan Minuman | Kesbangpol | 12 | Bulan | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.139.000 | 5.532.000 | 90 | 7.150.000 | DAU |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | Kesbangpol | 12 | Bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | 4.612.000 | 4.612.000 | 100 | 16.500.000 | DAU |

| 8 | 1 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|---|---|---|------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Kesbangpol | 12 | Bulan | 24.750.000 | 24.750.000 | 12.799.980 | 9.724.614 | 76 | 27.225.000 | DAU | - | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kesbangpol | 12 | Bulan | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.142.400 | 79 | 2.750.000 | DAU | - | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Kesbangpol | 12 | Bulan | 126.000.000 | 126.000.000 | 106.733.225 | 62.070.240 | 58 | 156.657.600 | DAU | - | |
| | | | | | | Tersedianya jasa Administrasi keuangan | Kesbangpol | 12 | Bulan | | | 3.800.000 | 1.785.500 | 47 | - | DAU | - | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | - |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Operasional/ Dinas | Kesbangpol | 12 | Bulan | 55.000.000 | 30.000.000 | 29.996.500 | 15.290.151 | 51 | 88.550.000 | DAU | - | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor/Aula/Rumah dan Ruang Arsip | Kesbangpol | 12 | Bulan | 3.250.000 | 3.250.000 | 499.100 | 1.194.775 | 33 | 3.575.000 | DAU | - | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | # | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin. Berkala Gedung Kantor | Kesbangpol | 12 | Bulan | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.996.900 | 7.964.000 | 100 | 3.300.000 | DAU | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---|---|---|---|-------------|---|-----------|------------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|--|-------------|------------|--|
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | Kesbangpol | 2 | Unit | | | | | | | | | 44.880.000 | | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai | Kesbangpol | 1 | Paket | | | | | | | | | | 96.840.920 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan kantor yang memadai | Kesbangpol | 1 | Paket | | | | | | | | | | 65.340.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai | Kesbangpol | 1 | Paket | | | | | | | | | | 17.154.500 | |
| 8 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | | Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksanya Penyusunan Program Kerja diBidang Idiologi wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan. | Temanggu ng | 2 | Kegiat an | 68.000.000 | 125.000.000 | 59.118.900 | 58.701.700 | 99 | | | | 162.800.000 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|-------------|----|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Telaksananya Penyusunan Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan narkotika, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan umat beraghama dan penghayat Kepercayaan Daerah | Temanggu ng | 14 | Kegiat an | 2.514.045.640 | 514.660.000 | 267.619.200 | 246.232.500 | 92 | 734.106.186 |
| 8 | 1 | 6 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | | | | | - |
| 8 | 1 | 6 | 2 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------|
| 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> | <p>Terlaksananya Penyusunan Progran kerja dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah</p> | <p>Temanggung</p> | <p>14</p> | <p>Kegiatan</p> | <p>736.000.000</p> | <p>533.600.000</p> | <p>1.973.030.700</p> | <p>1.809.289.900</p> | <p>72</p> | <p>589.939.900</p> | <p>DAU</p> |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--|--|------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|
| 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan diBidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah | Temanggung | 44 | Kegiatan | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.559.080 | 19.559.080 | 100 | 22.000.000 | DAU |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 6.655.511.390 | 4.487.051.922 | 5.147.745.109 | 4.681.911.245 | | 6.436.761.871 | |

Temanggung, September 2021

KEPALA BANKESBANGPOL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.456.588.333,00 dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.518.930.450,00 sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran untuk sebesar Rp. 7.650.717.591,00 yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosisal.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs.SATRIA ENDRA BASUKI,MM

Pembina Utama Muda

NIP.196111101985031018